BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perpajakan

1. Pengertian Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh warga negara kepada pemerintah, tanpa memberikan imbalan langsung. Pajak ini diwajibkan oleh hukum dan dialokasikan untuk mendukung berbagai kepentingan nasional demi mencapai kemakmuran bersama.¹

Dalam perspektif yang serupa, Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, yang sifatnya memaksa dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Rochmat Soemitro, perpajakan adalah suatu cara yang digunakan oleh negara untuk mengambil sebagian kekayaan rakyat berdasarkan undang-undang guna membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan bersama.

Selain itu, P. J. A. Adriani juga menegaskan bahwa perpajakan mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara

¹ Akhmad Syarifudin, “Buku Ajar Perpajakan,” *STIE Putra Bangsa* 4, no. 1 (2018): 1–251.

pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. Dengan kata lain, sistem perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menghimpun pendapatan negara tetapi juga memiliki fungsi regulasi atau peran strategis dalam pengendalian kebijakan fiskal serta stabilisasi dalam menjaga ekonomi suatu negara.

2. Manfaat Perpajakan

Perpajakan memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²

Selain sebagai sumber penerimaan negara, perpajakan juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang dapat mengendalikan perekonomian. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengatur distribusi pendapatan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu.

Pajak dalam pelaksanaannya memiliki beragam fungsi yang erat kaitannya dengan kepentingan publik. Fungsi-fungsi ini mencerminkan

² Sri Melyanti, Muhammad Hasan, And Muhammad Dinar, "Perpajakan," *Universitas Negeri Makassar*, 2019, 1–40, [Http://Eprints.Unm.Ac.Id/13463/1/Buku_Saku_Perpajakan1.Pdf](http://Eprints.Unm.Ac.Id/13463/1/Buku_Saku_Perpajakan1.Pdf).

peran penting pajak dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Hidayat, Nurdin, dan Purwana Dedi, fungsi pajak tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga strategis dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Adapun fungsi pajak tersebut antara lain:³

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi ini berkaitan dengan aspek pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dalam bentuk pengeluaran rutin, seperti pembayaran gaji, maupun pengeluaran non-rutin.

b. Fungsi Pendistribusian Pendapatan

Fungsi ini berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang mendorong masyarakat memperoleh penghasilan dari pekerjaannya. Dari perspektif ekonomi, pendistribusian pendapatan dapat memengaruhi tingkat inflasi maupun deflasi, baik dalam meningkatkan maupun menurunkannya.⁴

c. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini menekankan pada alokasi pengeluaran untuk kebijakan ekonomi dan sosial yang dirancang oleh pemerintah guna kepentingan masyarakat. Contohnya Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan

³ Dedi Purwana Urdin Hidayat, *Perpajakan: Teori Dan Praktik*, 2017.

⁴ Khalimi, "Teori Dan Praktik Hukum Pajak Dan Cara Perpajakan," 2020.

jalan, jembatan, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta pemerintah juga menyediakan dana untuk pendidikan gratis, beasiswa, serta layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, guna memastikan akses yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat

d. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini menekankan upaya menjaga stabilitas negara dengan mengurangi keresahan yang dialami oleh masyarakat. Salah satu langkah untuk mencapai stabilitas tersebut adalah melalui pengalokasian pembiayaan ke daerah dalam bentuk alokasi khusus. Selain penerimaan dari pajak, pendapatan negara yang diterima oleh pemerintah pusat maupun daerah juga dapat berasal dari sumber lain, seperti distribusi dan sumbangan.

B. Pendapatan Asli Daerah

1. Teori Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan dapat dipahami sebagai aliran masuk yang meningkatkan aset entitas atau pelunasan utang dalam periode tertentu, yang dihasilkan dari kegiatan utama seperti produksi atau penyediaan barang dan jasa. Secara lebih luas, pendapatan mencakup total penerimaan atau arus kas yang diperoleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya dari berbagai sumber.⁵

⁵ Muhammad Karyadi, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 – 2017." 8, No. 2 (2020): 180–192.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah daerah, yang berfungsi sebagai pendorong utama dalam mendukung berbagai inisiatif pembangunan serta penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Keberadaan PAD tidak hanya mencerminkan kemandirian finansial daerah, tetapi juga memainkan peran krusial dalam memastikan keberlanjutan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Menurut Budi S. Purnomo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber penerimaan yang bersifat lokal dan tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Sumber-sumber ini mencakup hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah

Sementara itu menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber tersebut mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

2. Rumus Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya lokal guna

⁶ S Agustini Et Al., *Pajak Dan Retribusi Daerah*, 2021.

membiayai kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintah daerah secara mandiri, tanpa sepenuhnya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan pembangunan. Rumus perhitungan PAD, yaitu:⁷

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{HPDD} + \text{LPS}$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

HPDD : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

LPS : Lain-lain PAD yang Sah

3. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah daerah harus memastikan bahwa sumber-sumber PAD dikelola secara efektif dan transparan guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik di daerah

⁷ Decelina Firdha Amalia and Elma Muncar Aditya, "BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah The Effect of Local Taxes , Retribution , and Regional- Owned Enterprise Outcome on Local Government Revenues at Regencies / Cities in Central Java Province," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2023.

masing-masing. Untuk mengevaluasi kinerja PAD, terdapat beberapa indikator yang digunakan sebagai ukuran dalam menilai sejauh mana daerah mampu menggali dan mengelola pendapatan lokal secara mandiri, yakni antara lain:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha yang beroperasi di suatu daerah dan manfaatnya digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan pajak pada berbagai sektor ekonomi serta aktivitas di tingkat daerah mencerminkan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga dapat lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas penyediaan jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan kepada masyarakat atau badan usaha, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Pendapatan yang diperoleh dari pungutan retribusi terkait penyediaan layanan atau penggunaan fasilitas umum merupakan aspek penting dalam keuangan daerah. Pungutan ini dapat mencakup retribusi

dari pasar, parkir, layanan kebersihan, dan berbagai jenis retribusi lainnya yang mencerminkan kontribusi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya publik.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset-aset milik pemerintah daerah, termasuk penyewaan lahan dan tanah, menunjukkan potensi pemanfaatan sumber daya yang ada, namun juga mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan dan optimalisasi aset tersebut.

d. Pendapatan Lain-lain yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah mencakup berbagai sumber, seperti sumbangan, hibah, dan pendapatan yang tidak tergolong dalam pajak atau retribusi, dengan syarat bahwa semua sumber tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁸

C. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo, pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha dan harus dibayar sesuai ketentuan peraturan daerah. Tujuan pajak ini adalah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah

⁸ Vinna Marlita Sari, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Study Kasus Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020)" 9 (2022): 356–63.

tersebut. Pajak daerah juga menjadi sumber utama pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di daerah tersebut.⁹

Sementara itu, menurut Halim, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Suparmoko, pajak daerah juga memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, di mana hasil penerimaan pajak dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, mendistribusikan pendapatan secara lebih adil, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi juga instrumen kebijakan ekonomi yang penting dalam pembangunan daerah.¹⁰ Pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Jenis Pajak Provinsi, BAB II Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, BAB II Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel

⁹ Agustini et al., *Pajak Dan Retribusi Daerah*.

¹⁰ H. Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, 2008.

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Hubungan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah memiliki peran krusial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah daerah yang bersifat mandiri. Melalui pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat memperoleh dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta penyediaan layanan publik. Semakin optimal pemungutan dan pengelolaan pajak daerah, diharapkan semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan PAD.¹¹ Namun, efektivitas hubungan ini sangat bergantung pada kebijakan perpajakan yang diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi dalam pengelolaan

¹¹ Naning Fatmawatie, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Pendapatan Daerah Kota Kediri."

penerimaan pajak oleh pemerintah daerah.¹² Menurut Sayuti, peningkatan jumlah pajak yang dipungut akan meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD yang pada gilirannya memperkuat kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan dan memberikan pelayanan publik. Secara konseptual, hal ini diharapkan pengelolaan pajak daerah dapat mencerminkan adanya hubungan positif yang erat dengan pertumbuhan PAD.¹³

D. Retribusi Daerah

1. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo, retribusi daerah mencakup pembayaran atas pemanfaatan fasilitas atau layanan yang secara langsung maupun tidak langsung diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Layanan ini dapat mencakup berbagai sektor, seperti kebersihan, parkir, pasar, transportasi umum, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan adanya retribusi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa layanan publik yang diberikan

¹² Abdul Kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia, Sustainability* (Switzerland), 2009, [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari).

¹³ Agustini Et Al., *Pajak Dan Retribusi Daerah*.

tetap berjalan optimal serta terus mengalami peningkatan dalam hal kualitas dan cakupan.¹⁴

Manfaat dari retribusi daerah sangat signifikan dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, retribusi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendapatan dari retribusi dapat dialokasikan untuk pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, retribusi daerah juga berkontribusi dalam menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan fasilitas publik serta mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan layanan yang mereka nikmati.¹⁵

2. Hubungan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena merupakan salah satu sumber penerimaan yang bersifat langsung dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sebagai pungutan yang dikenakan atas jasa atau izin tertentu, retribusi secara langsung berkontribusi terhadap kas daerah, sehingga semakin efektif pemerintah dalam mengelola dan menarik retribusi, semakin besar pula dampaknya terhadap PAD. Dengan demikian,

¹⁴ Hari Setiono, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Timur," *Prive, Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 1 (2018): 22–28, <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/139>.

¹⁵ Kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*.

hubungan antara retribusi dan PAD bersifat positif, di mana peningkatan penerimaan retribusi diharapkan dapat memperkuat keuangan daerah dan mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik.¹⁶

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan sebuah pernyataan yang diajukan oleh peneliti sebagai perkiraan atau dugaan mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu studi.¹⁷

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian. Meskipun jawaban yang diajukan didasarkan pada teori yang relevan, pernyataan ini masih memerlukan dukungan dari bukti empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Hipotesis Nol (H₀): Tidak terdapat pengaruh antara variabel Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 -2023.

Hipotesis Alternatif (H₁): Terdapat pengaruh antara variabel Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 -2023.

¹⁶ Agustini et al., *Pajak Dan Retribusi Daerah*.

¹⁷ Sia Deliyana Firmialy Yayat Suharyat, Faatihatul Ghaybiyyah, Ria Wuri Andary, *Metodologi Penelitian (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, 2023.

¹⁸ Mintarti Indartini And Mutmainah, *Analisis Data Kuantitatif Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Korelasi Dan Regresi Linier Berganda*, Vol. 14, 2024.

2. Hipotesis Nol (Ho): Tidak terdapat pengaruh antara variabel Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 -2023.
Hipotesis Alternatif (H2): Terdapat pengaruh antara variabel Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 -2023.
3. Hipotesis Nol (Ho): Tidak terdapat pengaruh antara variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 -2023.
Hipotesis Alternatif (H3): Terdapat pengaruh antara variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 -2023.